

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Kehidupan yang menyangkut orang banyak selalu berkaitan dengan berbagai masalah dan cita-cita hidup yang hendak dicapai. Demikian halnya dengan masalah perdamaian dan keadilan yang menjadi cita-cita semua manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Masalah perdamaian dan keadilan menjadi perhatian yang serius dan tidak main-main. Perdamaian dan keadilan sangat diinginkan semua orang, karena aspek ini menegaskan hidup manusia yang aman sekaligus menyatakan keutuhan, integritas dan cinta. Setiap orang yang hidup berdampingan dengan sesama, selalu mengimpikan adanya kedamaian. Mereka yang hidup berdamai dengan sesama dan diri sendiri adalah mereka yang berusaha untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di dunia, dengan itu mengusahakan dan menghayatinya dalam kehidupan setiap hari. Setiap pribadi yang mengasihi perdamaian pada hakikatnya melanjutkan firman ilahi dan menghadirkan nilai-nilai kebenaran di tengah dunia. Kecintaan terhadap perdamaian merupakan perwujudan konkret dari pewartaan kasih Allah kepada seluruh ciptaan. Tidak ada seorangpun yang menginginkan kekacauan dan ketidakadilan terjadi. Sejatinya, semua manusia menghendaki supaya ketidakadilan dan peperangan dilenyapkan sembari mengusahakan perdamaian.

Perdamaian kini dihadapkan dengan realitas yang berat untuk mengupayakan keadilan dan cinta. Mengusahakan perdamaian sepertinya menjadi suatu yang sulit dan niscaya untuk diwujudkan. Semua orang masih terjerat oleh sikap egois dan kepentingan kelompok tertentu. Orang lebih mengutamakan perdamaian untuk diri sendiri dan kelompok daripada mengusahakan perdamaian dunia. Sikap yang demikian membuka ruang bagi masalah ketidakadilan serta menutup jalan bagi terciptanya perdamaian. Realitas yang terjadi kini adalah perdamaian semakin diredam karena sikap egoisme manusia, kekerasan dan

ketidakadilan serta perang yang merasuki hidup manusia. Kasus ketidakadilan dan peperangan sepertinya “dibenarkan” sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sekalipun demikian, hakekat manusia adalah mendambakan perdamaian dalam hidup. Hakekat demikianlah yang selalu mendorong dan menggerakkan hati nurani setiap orang untuk mengusahakan perdamaian dan keadilan dalam hidup. Hal ini tidak dapat dielakan, sebagai manusia yang bermartabat tidak dapat hidup diatas penderitaan melainkan bertekad memeluk cinta, keadilan dan perdamaian.

Ketidakadilan dan kekuasaan kini semakin menguasai arena hidup manusia. Di mana-mana terjadi kasus kekerasan dan penindasan yang berujung pada peperangan. Kejahatan dan perang melahirkan banyak penyakit bagi kehidupan manusia. Perampasan perdamaian dari kehidupan manusia menimbulkan kasus ketidakadilan, pemerasan, intimidasi, perampasan hak milik, pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, rasis, dan pemboikotan hak. Sudah jadi semacam kebiasaan, di mana yang memiliki status dan kuasa berlaku semena-mena tanpa memikirkan orang lain. Demikian jika dikatakan bahwa yang berkuasa bisa melakukan apa saja dan kepada siapa saja, termasuk melakukan pelanggaran atas hak yang kemudian dibenarkan oleh kekuasaan dan status yang dimiliki.

Keadaan dunia yang demikian menjauh dari kedamaian dan keadilan, turut menggerakkan hati semua orang untuk bersama mengupayakan adanya perdamaian. Pimpinan Gereja Universal, Paus Yohanes Paulus XXIII menyuarakan seruan pastoral kepada dunia atas situasi yang sedang terjadi melalui Ensiklik *Pacem In Terris*.¹ Ia menyuarakan kepada dunia untuk segera bergandeng tangan membangun perdamaian dan kesadaran Gereja Katolik untuk turut ambil bagian secara utuh dalam tugas kemanusiaan (kerasulan). Ditegaskan bahwa kedamaian dapat tercipta apabila setiap orang mengupayakannya dan

¹Istilah ini merupakan derivasi bahasa Latin; *Pax* mengacu pada kondisi harmonis, *In* sebagai preposisi penunjuk tempat, dan *Terra* yang bermakna dunia atau bumi, dengan demikian secara harafiah *Pacem In Terris* berarti damai di bumi. K. Prent, J. Adisubrata dan W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 616. Pada uraian selanjutnya, penulis hanya mempersingkat nama Ensiklik *Pacem In Terris* dengan kata (PT) dengan nomor artikel dari dokumen Paus Yohanes XXIII, *Pacem In Terris Tentang Usaha Mencapai Perdamaian Semesta Dalam Kebenaran, Keadilan, Cinta Kasih dan Kebebasan*, R. Hardawirya (Penerj.) (Jakarta: Dokpen KWI, 1999).

menghormati dalam hidup, sambil meletakkan semua dalam keadilan, kebenaran dan kebebasan yang tulus. Artinya setiap orang memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas kekacauan yang sama untuk mengupayakan kedamaian. Realitas dunia sedang mengalami kekacauan yang serius di mana ketidakadilan, pelanggaran HAM dan peperangan merajalela.² Berbagai peristiwa kekerasan terjadi di mana-mana. Duka internasional tercipta seperti perang, penindasan dan perkembangan dunia militeristik yang merasuk ke seluruh kehidupan manusia. Persenjataan dan perkembangan nuklir maupun berbagai krisis menjadi ancaman bagi kehidupan manusia dan dunia.

Krisis perdamaian yang dialami dunia saat itu kemudian menggerakkan Jantung Gereja Katolik melalui Paus Yohanes agar mengajak semua manusia untuk mengupayakan perdamaian dunia. Beliau menegaskan bahwa perdamaian dunia dapat terwujud apabila firman Allah dapat ditaati dan dijalankan. Selanjutnya perdamaian dunia tidak saja dapat terjaga dengan adanya gerakan militeristik pemerintah yang kuat, melainkan dapat terwujud ketika cinta dan kasih dihidupi. Allah telah menjadikan semua ciptaan-Nya dengan penuh cinta, maka saling mengasihi dan mencintai adalah anugerah.³ Penulis hendak melihat bagaimana relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi perjuangan Gereja Katolik dalam menegakan keadilan dan perdamaian di Papua.

Upaya membangun perdamaian dan keadilan di Papua menjadi kepentingan bersama bagi seluruh pihak. Berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM, kemiskinan, perampasan hak, dan kasus-kasus lainnya terus mengancam terciptanya kehidupan yang aman. Ketidakadilan serta tindakan kekerasan telah melekat dalam realitas sosial masyarakat Papua, hingga wilayah ini seolah mengalami “penjajahan” oleh negara sendiri. Beragam konflik pun muncul dan menimbulkan krisis berkepanjangan dengan banyak korban. Hubungan antara Jakarta (pemerintah) dan Papua pun kian tegang dan sulit dikendalikan. Pertikaian serta perlawanan antara militer Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah berlangsung sejak 1961 dan masih berlanjut hingga kini. Pada masa

²*Ibid.*

³*Ibid.*

pemerintahan Presiden Soeharto, Papua bahkan pernah ditetapkan sebagai Daerah Operasional Militer (DOM).

Upaya yang ditempuh pemerintah pusat pada kenyataannya tidak menghasilkan perubahan berarti. Justru Papua menghadapi musibah dan krisis kemanusiaan yang berat. Ratusan warga Papua maupun pendatang menjadi korban tindakan kekerasan aparat militer. Status DOM memang dicabut setelah runtuhnya rezim Soeharto pada 1998, namun praktik kekerasan di Papua tetap berlanjut. Berbagai persoalan sosial menyebar luas dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan hingga sekarang. Kemiskinan, penindasan, perebutan hak atas tanah, masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga kekerasan terhadap manusia terus terjadi. Potret kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dan proses militerisasi seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik Papua yang belum menemukan titik akhir.

Situasi yang demikian mengundang dan menggerakkan Gereja untuk turut ambil bagian dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan di Papua. Gereja berperan mengajak untuk membangun dialog dengan agama lain demi terciptanya perdamaian tersebut. Upaya yang dilakukan secara internal maupun eksternal demi kehidupan yang penuh dengan cinta akan damai sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya segala usaha-upaya yang telah dilakukan, Gereja masih mendapat kritikan yang memojokkan. Akan tetapi, bagi Gereja kritikan itu justru terus membakar semangat untuk semakin tegas bersuara danewartakan damai dan kebenaran. Ada isu dari kedua belah pihak yang berseteru. Pemerintah pusat (Jakarta) atau militer, selalu mencurigai dan membangun asumsi bahwa Gereja bersuara untuk mendukung Papua (untuk merdeka). Padahal, Gereja hanya bersuara untuk mengangkat hak dan derajat orang Papua yang selalu menjadi korban dari aksi militerisasi yang terjadi di Papua. Gereja bergerak sebagai bentuk ketaatan pada Kristus serta kemanusiaan yang utuh, bukan untuk mendukung OPM. Demikian dari pihak OPM, Gereja dianggap sebagai pemberontak yang pro terhadap militer untuk terus beroperasi. Dialog yang dibangun Gereja merupakan bentuk nyata mencari jalan keluar kasus Papua.

Pandangan-pandangan tersebut menimbulkan berbagai persepsi masyarakat yang sering kali kabur tentang bagaimana sebenarnya posisi Gereja. Gereja pun kerap menerima penilaian yang bertentangan—ada yang memujinya, ada pula yang melontarkan kritik tajam. Keberadaan Gereja di tengah kondisi ketidakadilan dan kekerasan akhirnya menimbulkan pertanyaan: apa peran dan tugas Gereja dalam situasi demikian? Sudah jelas bahwa Gereja menolak setiap bentuk kekerasan dan konflik bersenjata yang menimbulkan banyak korban. Gereja juga tidak dapat mendukung adanya pandangan rakyat Papua yang menginginkan perpecahan, terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena hal itu bukan bagian dari misi Gereja dan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah dan hukum negara. Kendati begitu, Gereja tetap berkomitmen menyuarkan keadilan dan perdamaian, serta menolak segala tindakan pemberontakan maupun kekerasan yang menyengsarakan masyarakat Papua. Dalam setiap dinamika, Gereja berupaya mengambil posisi moderat demi memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Oleh karena itu, Penulis juga mencoba menempatkan ensiklik *Pacem In Terris* sebagai tanda terang iman dan usaha perwujudannya dalam situasi hidup konkret, terutama di lokasi pastoral serta menjadi sebuah kritikan dan koreksi bagi Gereja untuk terus memperbaharui diri dalam misi pewartaan kerajaan Allah yang sungguh nyata di Papua. Dalam pembahasan lebih lanjut, penulis mengajak para pembaca untuk melihat lebih jauh **RELEVANSI ENSIKLIK *PACEM IN TERRIS* BAGI PERJUANGAN GEREJA KATOLIK DALAM MENEGAKKAN KEADILAN DAN PERDAMAIAN DI PAPUA.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penyusunan tulisan ini, permasalahan utama yang akan dianalisis dalam karya ilmiah ini adalah sejauh mana Relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* terhadap Upaya Gereja Katolik dalam Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian di Papua?

Formulasi masalah ini mencakup pula pertanyaan turunan yang akan dikaji, yaitu *Pertama*, bagaimana mengenal Paus Yohanes XXIII serta memahami

konseptualisasi keadilan dan perdamaian dalam Ensiklik *Pacem In Terris*? Kedua, apakah Ensiklik *Pacem In Terris* memiliki relevansi yang berkelanjutan dengan konteks konflik pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan bagaimana peran Gereja Katolik dalam mengupayakan keadilan dan perdamaian di Papua?

1.3 Tujuan Penulisan

Beberapa sasaran dan aspek krusial yang diharapkan terealisasi melalui penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kompetensi esensial guna memperoleh gelar strata satu (S1) bidang Filsafat, khususnya dalam program studi Ilmu Filsafat-Teologi Agama Katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero (IFTK) Maumere.

Kedua, skripsi ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman penulis mengenai tokoh agama Katolik Paus Yohanes XXIII serta mengasah kapabilitas intelektual dalam melakukan diseksi atas isu-isu pelanggaran hak asasi manusia yang relevan.

Ketiga, penyusunan skripsi ini dilaksanakan untuk mengeksplorasi dan menginternalisasi paradigma pemikiran yang terkandung dalam Ensiklik *Pacem In Terris* menyangkut perwujudan perdamaian global.

Keempat, untuk melihat situasi konflik ketidakadilan di Papua dan relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi perjuangan Gereja Katolik di Papua.

1.4 Metode Penulisan

Dalam konstruksi karya ilmiah ini, penyusunan memakai pendekatan studi literatur (*Literary*). Penyusunan merujuk pada beragam sumber literatur yang berfungsi sebagai fondasi teoretis bagi elaborasi tulisan ini. Sumber literatur yang diinvestigasi mencakup dokumen-dokumen Gereja, literatur-literatur yang relevan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua, doktrin iman Katolik, serta dimensi kemanusiaan dan kehidupan sosial. Lebih lanjut, penyusun melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan terkini yang dihadapi oleh Gereja

Katolik di Papua, yang selanjutnya direfleksikan dalam karya tulis ini sebagai integral dalam memperjuangkan keadilan, kebebasan, dan perdamaian di Papua.

1.5 Sistematikan Penulisan

Karya ilmiah ini disajikan dalam empat bab utama dengan orientasi struktural sebagai berikut:

Bab I mencakup pengantar. Bab ini merangkum latar belakang kajian, tujuan/sasaran penelitian, metodologi penulisan, serta sistematika/tata urutan pembahasan. Tinjauan ini krusial, sebab tidak hanya berfungsi sebagai pembuka yang menguraikan aspek-aspek praksis, tetapi juga sebagai penentu arah dan fokus pembahasan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam uraian ilmiah ini.

Bab II didedikasikan untuk memperkenalkan sosok Paus Yohanes XXIII serta Ensiklik *Pacem In Terris*. Selanjutnya, akan dilakukan telaah mendalam terhadap epistemologi dasar Ensiklik *Pacem In Terris* yang menekankan tema “Perdamaian Dunia”.

Bab III, penulis mencoba melihat relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi perjuangan Gereja Katolik dalam menegakkan keadilan dan perdamaian di Tanah Papua. Bagian ini juga penulis menyajikan beberapa informasi terkait kasus pelanggaran HAM dalam genggamannya memori passionis serta menilik sistem pemerintah Indonesia dalam menyikapi kasus HAM yang terjadi di Papua.

Bab IV, penulis menutup tulisan ini dengan mencatat kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir karya ilmiah ini. Sebagai penutup tulisan ini, kesimpulan dan saran menjadi semacam muara untuk terus menampung segala pengetahuan terkait informasi keadilan dan perdamaian yang diperjuangkan Gereja Katolik di Tanah Papua, terutama dalam situasi kasus HAM yang terjadi.